

KAJIAN BEST PRACTICE INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT : MENIKAH DAN MENANAM POHON

Octa Soehartono, SE dan Rizky Fitria, SE

Lembaga Administrasi Negara

E-mail: octasoehartono@yahoo.co.id, fitria.rizky@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah baik dalam tataran Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini sangat penting untuk diimplementasikan dimana salah satu agenda tersebut adalah penerapan Otonomi Daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu strategi untuk menghadapi era baru dengan menghasilkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, konsisten, terintegrasi, dan responsive secara berkesinambungan. Maka diperlukan Pemerintah Daerah yang dapat menghasilkan kebijakan dan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah masalah kependudukan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup penduduk yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam bahasan kependudukan ini, Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi masalah berupa adanya tekanan penduduk yang sangat tinggi terhadap lahan kritisnya. Hal ini menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten dengan lahan kritis terluas di Propinsi Jawa Barat yaitu 89.917 Ha. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga menghadapi masalah tingginya angka perkawinan dan perceraian dimana dalam kurun waktu setahun terdapat 27 ribu pasangan yang menikah. Ini tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Karena itulah, Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan berupa kewajiban menanam pohon bagi warganya yang menikah dan bercerai. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemulihan lahan kritis sekaligus mengontrol tingkat pernikahan dan perceraian di wilayah Kabupaten Garut.

Kata kunci: Reformasi birokrasi, otonomi daerah, lahan kritis, pernikahan dan perceraian

1. PENDAHULUAN

1. SELAYANG PANDANG KABUPATEN GARUT¹

1.1. Wilayah Administratif dan Kependudukan

Kabupaten Garut adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Samudera Indonesia. Kabupaten ini terbentuk dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Deandels. Pembubaran tersebut mengharuskan Bupati Limbangan kala itu yaitu Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia yang akan mencari daerah baru yang dapat dijadikan Ibu Kota Kabupaten sehingga ditemukanlah daerah yang kemudian dinamakan Kabupaten Garut.

Secara administratif, data tahun 2009 menunjukkan Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 306.512 Ha dengan 42 Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 403 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibalong dengan luas wilayah 21.359 Ha, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan

Kersamanah dengan luas 1.650 Ha. Berdasarkan sensus terakhir yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010 kemarin, jumlah penduduk Kabupaten Garut tercatat sebanyak 2.737.526 jiwa dengan perbandingan laki-laki sebanyak 1.397.756 jiwa dan perempuan sebanyak 1.339.770.

1.2. Visi dan Misi

Untuk periode waktu 2009 – 2014, Pemerintah Kabupaten Garut memiliki visi “Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridlo Allah SWT.” Visi tersebut memiliki maksud agar Kabupaten Garut bersatu baik secara wilayah dan masyarakat dengan segala potensi yang dimilikinya, sehingga penduduknya dapat memenuhi segala kebutuhan dengan kemampuan sendiri untuk menjadi masyarakat yang maju dan madani, dan memiliki kepercayaan terhadap Pemerintahnya sehingga terwujud pola *Good Governance* yang didasari ridho Allah SWT.

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Garut adalah:

1. Membangun kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal;

¹Sumber: http://www.garutkab.go.id/pub/static_menu/detail/sekilas_sejarah, diakses pada tanggal 10 Mei 2011.

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata disertai pengembangan budaya lokal;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang;

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan beberapa strategi, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan “*Good Governance*”;
2. Penegakkan supremasi hukum, demokrasi dan hak azasi manusia;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan melalui pengembangan pendidikan melalui pengembangan pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, fasilitas peribadatan dan pendidikan keagamaan;
6. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan aspek manfaat dan resiko terhadap lingkungan;
7. Optimalisasi penataan ruang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan;
9. Pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi;
10. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, Pos dan Telekomunikasi, Komunikasi dan Media Massa untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
11. Peningkatan dan pengembangan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia;
12. Pemeliharaan dan pengembangan seni budaya sebagai identitas daerah;
13. Pengentasan kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja dan penanganan daerah tertinggal.

1.3. Perspektif Ekonomi

Dianugerahi wilayah dengan kesuburan tanah, beraneka ragam flora fauna serta keindahan alam, menjadikan Kabupaten Garut berpotensi untuk dikembangkan secara ekonomi dan investasi. Dilihat dari sisi ekonomi, sektor yang menjadi sektor utama

adalah sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan hampir 75% wilayah Kabupaten Garut digunakan untuk pertanian. Setelah pertanian, sektor yang menjadi andalan Kabupaten ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, Kabupaten Garut memiliki potensi di sektor industry terutama agroindustri, sektor pariwisata yang dikaitkan dengan kawasan konservasi sumber daya alam, sektor perikanan, serta sektor pertambangan bahan galian golongan C.

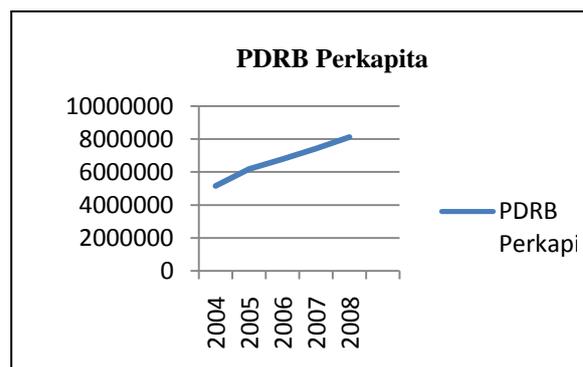
Pemanfaatan dan pengelolaan yang baik terhadap sektor-sektor tersebut tentu saja memberikan pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut. Berikut data PDRB Kabupaten Garut periode 2004 sampai 2008

Tabel 1. Data PDRB Kabupaten Garut Periode 2004-2008 (Triliun Rupiah)

Tahun	PDRB
2004	8.418
2005	8.768
2006	9.162
2007	9.59
2008	10.06

Sumber: Tahun 2009, Tahun Politik Bagi Kabupaten Garut (Yan AS, 2009). Data diolah

Table diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Garut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, Pertumbuhan PDRB perkapita yang dapat menjadi acuan kesejahteraan masyarakatnya juga mengalami peningkatan seperti tampak pada grafik dibawah ini:



Grafik 1. Data PDRB Perkapita Kabupaten Garut Periode 2004-2008

Sumber: Tahun 2009, Tahun Politik Bagi Kabupaten Garut (Yan AS, 2009). Data diolah

2. REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MENUJU *GOOD GOVERNANCE*

Reformasi birokrasi sebagai sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan dengan mewujudkan cita-cita birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Dalam era otonomi daerah, sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi dimana hal ini sangat penting untuk diimplementasikan sebagai salah satu usaha untuk memajukan dan mensejahterahkan masyarakat menuju penciptaan *good governance* yang merupakan instrumen terpenting dalam proses reformasi birokrasi yang juga menjadi persyaratan utama dalam menciptakan demokrasi yang substansial.

Penerapan *Good Governance* (LAN 2007) secara konseptual dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara elemen-elemen yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja yang ingin dicapai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ada banyak pemikiran mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Implementasi reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup perubahan manajemen struktural dan organisasi menuju perampingan ukuran (*downsizing & rightsizing*) dan komponen birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara gradual terhadap nilai (*public value*) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa (*ambtenaar*) menjadi pelayanan & pengayoman.

Di usianya yang hampir seabad, pemerintah Kabupaten Garut terus berbenah, khususnya dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Garut sejak era kepemimpinan Bupati Garut periode 2009-2014 terpilih H. Aceng HM. Fikri, S.Ag mulai melakukan berbagai inovasi. Dalam pidato Yan Yan AS (2009), beliau menjelaskan bahwa Bupati Garut tersebut melalui **Strategi Dasar Sinergitas Pelaksanaan**

Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut berupaya menjawab tuntutan masyarakat, salah satunya, melalui strategi pokok dengan optimalisasi kinerja birokrasi pemerintahan daerah. Optimalisasi ini dilakukan dengan langkah peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan Iptek, sebagai wujud untuk melakukan reformasi birokrasi di tataran pemerintahannya, dengan memfokuskan diri dalam pencapaian visi dan misi yang telah dirancang. Salah satunya dengan menciptakan stabilitas pemerintahan, stabilitas politik, dan stabilitas dunia usaha yakni dengan cara membangun kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal dengan mengembangkan pendidikan formal dan non-formal, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata disertai pengembangan budaya lokal, meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang.

Langkah lain dalam optimalisasi ini adalah peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang dinamis, beretika serta berorientasi pada upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Yang tak kalah pentingnya adalah memantapkan kemampuan keuangan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah disertai dengan pengawasan untuk menekan tingkat kebocoran.

Dalam masalah birokrasi, beliau juga mengingatkan dan menghimbau agar semua pihak menempatkan kembali birokrasi pada ruang yang benar, yaitu organisasi pelayanan publik yang di dalamnya terdapat aparatur profesional yang mengetahui, memahami, mampu memberikan pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat, serta mau dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayaninya.

3. INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT: MENIKAH DAN MENANAM POHON

Dalam pembahasan *best practice* Pemerintah Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan kebijakan yang menarik untuk diketahui bahkan diikuti oleh daerah lainnya. Kebijakan tersebut adalah penerapan program menanam pohon bagi pasangan yang akan menikah

dan pasangan yang akan bercerai di Kabupaten Garut.

Menurut Edi Muharam, Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan, Dinas Kehutanan Garut dalam wawancaranya dengan Radio Netherland Wereldomroep [RNW], program tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

a. Letak kawasan hutan Kabupaten Garut yang berada di hulu Sungai Cimanuk, dan di dominasi oleh pegunungan

Mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 195 Tahun 2003, Kabupaten Garut memiliki kawasan hutan yang terluas dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat yaitu seluas 107.865 Ha dengan hutan lindung seluas 75.572 Ha, hutan konservasi seluas 26.727 Ha, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 5.400 Ha, dan hutan produksi seluas 1.66 Ha².

Secara geografis, keseluruhan kawasan hutan tersebut berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Hulu, DAS Cikaengan/Cisanggiri, DAS Cilayu/Cikandang, dan DAS Ciwulan Hulu. Itulah sebabnya keberlangsungan hutan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung fungsi ekologi dan produksi di Kabupaten ini³.

Program penghijauan di DAS tentulah sangat penting dilakukan agar dapat memenuhi fungsinya sebagai DAS Cimanuk yang akan mengairi areal persawahan disekitarnya.

b. Meluasnya lahan kritis di Kabupaten Garut.

Sumber daya hutan di Kabupaten Garut yang semestinya dijaga, telah mengalami degradasi. Hal itu dapat disimpulkan dari banyaknya lahan kritis yang terdapat di daerah ini.

Pada tahun 2009 luas lahan kritis di Kabupaten Garut mencapai 31.553 Ha⁴. Lahan kritis biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut⁵:

- Tekanan dan penambahan penduduk
- Luas areal pertanian yang tidak sesuai
- Pengolahan hutan yang tidak baik dan penebangan illegal
- Pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali
- Eksploitasi bahan tambang.

Terus meluasnya lahan kritis tentu saja dapat menyebabkan kualitas hidup penduduk yang

²http://www.garutkab.go.id/pub/static_menu/detail/berita, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011

³ Ibid.

⁴ John Doddy Hidayat, <http://antarajawabarat.com/lihat/berita/19012/lihat/kategori/94/Kesra>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011

⁵ Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002; www.menlh.go.id/i/art/Daftar%20Isi%20dan%20Penyusunan.pdf

diunduh pada tanggal 13 Mei 2011.

semakin menurun, lahan tinggal semakin menyempit sehingga tingkat populasi menjadi sangat padat, hingga kerusakan lingkungan lainnya.

Menghindari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut merasa perlu mengeluarkan kebijakan penanaman pohon bagi pasangan yang menikah dan bercerai.

c. Jumlah penduduk Kabupaten Garut yang terus meningkat.

Penduduk Kabupaten Garut terus meningkat dari tahun ke tahun dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2010 sebesar 1.53%⁶. Faktor mutasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi menentukan *trend* dari Laju Pertumbuhan Penduduk tersebut. Berikut data Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut per periode sensus penduduk dari tahun 1961 – 2010.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut 1961 – 2010

Tahun	LPP
1961-1971	2,74
1971-1980	2,38
1980-1990	1,66
1990-2000	1,66
2000-2005	1,57
2005-2008	1,53*
*) Estimasi	

Sumber: www.garutkab.go.id

Sementara itu, tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Pertumbuhan Kabupaten Garut periode 1971 – 2010

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Penduduk	Sex Ratio
1971	-	-	1.200.407	-
1980	-	-	1.483.035	-
1985	-	-	1.641.617	-
1990	-	-	1.748.634	-
1995	-	-	1.738.418	-
1997	-	-	1.905.465	-
1998	-	-	1.912.055	-
2001	1.043.242	1.007.850	2.051.092	103,51
	1.088.	1.050.8	2.139.	103,

⁶http://www.garutkab.go.id/pub/static_menu/detail/skilas_sejarah, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Penduduk	Sex Ratio
2002	276	91	167	56
2003	1.106.473	1.067.150	2.173.623	103,68
2004	1.121.283	1.082.892	2.204.175	103,55
2005	1.139.046	1.100.045	2.239.091	103,55
2006	1.157.252	1.117.721	2.274.974	103,54
2007	1.174.800	1.134.973	2.309.773	103,51
2008	1.256.176	1.200.712	2.456.888	104,6
2009	1.370.384	1.313.351	2.683.735	104,3
2010	1.397.756	1.339.770	2.737.526	104,3

Detail LPP & Jumlah Penduduk 1971-2000 Kab. Garut per Kecamatan (pdf-87 kb)

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Garut

Sumber: www.garutkab.go.id

Pertumbuhan penduduk yang terus naik seperti yang diperlihatkan oleh tabel diatas tentu harus diiringi oleh ketersediaan lahan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

d. Tingginya angka pernikahan dan perceraian di Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut adalah kabupaten dengan tingkat pernikahan dan perceraian yang cukup tinggi. Dalam setahun, rata-rata terdapat 27.676 pasangan yang melangsungkan pernikahan dan 1.252 pasangan yang bercerai⁷. Program kewajiban menanam pohon diharapkan mampu menekan salah satu masalah Kabupaten Garut ini.

Mengacu pada empat hal diatas, Bupati Kabupaten Garut, H. Aceng HM. Fikri, S.Ag, memandang penting adanya suatu partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan Garut yang hijau sekaligus menjamin keberlangsungan masa depan masyarakatnya. Partisipasi itu diwujudkan melalui kerjasama antara Dinas Kehutanan dengan Departemen Agama khususnya KUA yang melahirkan Surat Anjuran Bupati Garut No. 522.4/205/Dishut yang menjelaskan mengenai kewajiban menanam 10 pohon bagi pasangan yang akan menikah, dan 50 pohon bagi pasangan yang akan bercerai.

Kewajiban tersebut dibebankan kepada pasangan yang akan menikah karena diasumsikan keturunan mereka yang nantinya akan hidup dan berkembang

⁷<http://www.harianpelita.com/read/11921/11/antar-daerah/penghargaan-kebijakan-tanam-pohon-/>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011.

disana. Selain itu, kewajiban menanam pohon dalam jumlah yang lebih banyak dibebankan kepada pasangan yang hendak bercerai selain bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, juga bertujuan untuk menjamin kehidupan masa depan pasangan yang bercerai tersebut.

Jika program ini dapat berjalan dengan berkelanjutan, maka dalam jangka waktu lima tahun akan terhimpun bibit pohon produktif sekitar 1,6 juta batang dan kemudian akan ditanam lahan kritis mencapai 4.245 Ha⁸.

Atas inovasi yang telah berjalan semenjak tahun 2009 ini, dimana telah berhasil mereboisasi lahan kurang lebih 2000 Ha⁹, Pemerintah Kabupaten Garut masuk dalam 30 daerah nominator penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2010 yang digagas Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam sambutannya ketika seminar sosialisasi *Innovate Government Award* (2010), *Innovate Government Award* (IGA) adalah salah satu kegiatan kementerian yang telah dilakukan semenjak tahun 2007 sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dari 30 nominator yang telah terpilih, kemudian diseleksi kembali oleh Tim Ahli hingga menyisakan 12 nominator yang terus dipersempit menjadi empat pemenang. Kategori penilaian yang dilakukan meliputi bidang tata kelola pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Penilaian tim ahli kemudian menyatakan Kabupaten Garut menjadi salah satu dari 12 nominasi yang menerima penghargaan IGA 2010 pada tanggal 15 Desember 2010 lalu. Walaupun tidak menjadi pemenang, inovasi yang belum memiliki payung hukum dan baru berupa himbauan bupati ini patut diapresiasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

Best Practices merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi dimana keberhasilan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam era otonomi daerah sangat bergantung dari beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain adalah faktor kepemimpinan dimana kemauan dan komitmen Bupati Garut H. Aceng HM. Fikri, S.Ag dibantu dengan segenap penyelenggara pemerintah daerah untuk merubah daerah tersebut menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Faktor lain adalah partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat dalam usaha menjaga keberlangsungan masa depan lingkungan hidup masyarakat.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Dalam tulisan ini, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Garut mampu mendorong inovasi-inovasi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen public, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan Iptek.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut membuat inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu kewajiban menanam 10 pohon bagi pasangan yang akan menikah, dan 50 pohon bagi pasangan yang akan bercerai.

Disatu sisi, keberhasilan program ini dibuktikan dengan pemulihan lahan kritis kurang lebih seluas 2000 Ha di wilayah Kabupaten Garut dan mampu membawa Kabupaten Garut menjadi salah satu nominator *Innovative Government Award* (IGA) 2010 dalam satu tahun pertama pelaksanaannya.

Disisi lain, inovasi ini belum memiliki payung hukum dalam implementasinya selain hanya berupa himbauan dari Bupati. Alangkah lebih baik jika inovasi tersebut dibakukan dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan penanaman pohon hingga sanksi bagi pasangan menikah dan bercerai yang tidak melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
- Best Practices* Pemerintah Daerah: Inovasi Kelembagaan, Sistem dan Prosedur, Pengembangan SDM Aparatur dan Pemantapan Budaya Organisasi, LAN 2009.
- John Doddy Hidayat, <http://antarajawabarat.com/lihat/berita/19012/lihat/kategori/94/Kesra>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011.
- <http://www.harianpelita.com/read/11921/11/antar-daerah/penghargaan-kebijakan-tanam-pohon-/>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011.
- Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002; diunduh pada tanggal 13 Mei 2011.
- http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktu/indonesia060905/pengantin_tanam_pohon2009_0310-redirected, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011.
- http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6084:garut-nominator-iga-2010&catid=1:latest-news&Itemid=18, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011.

<http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/tanam-pohon-dulu-baru-nikah>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011.

<http://jabar.tribunnews.com/read/artikel/18637/37-Juta-Pohon-Ditanam-di-Lahan-Kritis>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2011.

Website Pemerintah Kabupaten Garut: <http://www.garutkab.go.id>